



PERAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) SEBAGAI KATALISATOR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Wahyu Candra¹, Depi Putri², Septia Novarisa³

Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau^{1,2,3}

e-mail: wahyucandra123oke@gmail.com

Diterima: 23/06/2026; Direvisi: 23/07/2026; Diterbitkan: 29/09/2026

ABSTRAK

Pembangunan daerah yang partisipatif membutuhkan keterlibatan berbagai aktor masyarakat sipil, termasuk organisasi mahasiswa. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari perspektif kaderisasi, gerakan sosial, dan pendidikan politik, kajian yang menempatkan PMII sebagai katalisator pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial dan pembangunan partisipatif masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PMII Kota Lubuklinggau sebagai katalisator pembangunan daerah melalui perspektif modal sosial dan pembangunan partisipatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus PMII, kader aktif, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII berperan sebagai aktor masyarakat sipil yang memperkuat pembangunan daerah melalui pengembangan modal sosial, yang ditandai dengan penguatan kepercayaan masyarakat, perluasan jejaring kolaboratif, peningkatan partisipasi publik, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. PMII juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi, kolaborasi, dan penyampaian rekomendasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa PMII berperan dalam memperkuat kesadaran sosial masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pembangunan daerah, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya, pendanaan, dan kolaborasi lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan PMII sebagai katalisator pembangunan daerah melalui integrasi perspektif modal sosial dan pembangunan partisipatif, sehingga memperluas pemahaman konseptual mengenai kontribusi organisasi mahasiswa sebagai aktor masyarakat sipil dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci: *PMII, Pembangunan Daerah, Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Publik.*

ABSTRACT

Participatory regional development requires the involvement of various civil society actors, including student organizations. Although numerous studies have examined the Indonesian Islamic Student Movement (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PMII]) from the perspectives of cadre development, social movements, and political education, limited attention has been given to its role as a catalyst for regional development through social capital enhancement and participatory development. This study aims to analyze the role of PMII in Lubuklinggau City as a catalyst for regional development from the perspectives of social capital and participatory development. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving PMII administrators, active members, and relevant stakeholders. Data



were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that PMII functions as a civil society actor that strengthens regional development by fostering social capital through building public trust, expanding collaborative networks, enhancing public participation, and developing human resource capacity. PMII also serves as a bridge between local communities and the regional government by facilitating communication, collaboration, and policy recommendations. The findings further suggest that PMII plays an important role in strengthening public social awareness and encouraging community participation in regional development, despite facing challenges related to limited organizational resources, funding, and cross-sector collaboration. The novelty of this study lies in positioning PMII as a catalyst for regional development through the integration of social capital and participatory development perspectives, thereby extending the conceptual understanding of the contribution of student organizations as civil society actors in regional development.

Keywords: *PMII, Regional Development, Social capital, Community Empowerment, Public Participation.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada era desentralisasi tidak lagi dipahami sebagai proses administratif yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, melainkan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Paradigma pembangunan kontemporer menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan karena pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik (Mansuri & Rao, 2013). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan aktor-aktor non-negara (non-state actors) yang memiliki kedekatan dengan masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Organisasi masyarakat sipil berperan strategis sebagai penghubung antara negara dan masyarakat melalui fungsi advokasi, edukasi, pemberdayaan, serta pengawasan kebijakan publik (Zuliyah, 2018).

Dalam konteks tersebut, mahasiswa merupakan bagian penting dari masyarakat sipil yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan berpikir kritis, dan sensitivitas sosial sehingga berperan sebagai agent of change, social control, dan moral force (Atmojo, 2025; Muna, 2022). Peran tersebut umumnya diwujudkan melalui organisasi kemahasiswaan yang tidak hanya menjadi sarana kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan, tetapi juga membangun *social capital* berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kerja sama yang mendukung tindakan kolektif dalam menyelesaikan persoalan publik (Coleman, 1988; Putnam, 2000). Dengan demikian, organisasi mahasiswa memiliki potensi strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat, membangun jejaring sosial, dan mendukung pembangunan daerah.

Salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan kader dan gerakan sosial di Indonesia adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sejak didirikan pada tahun 1960, PMII berkembang sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Selain berorientasi pada penguatan intelektual dan keislaman mahasiswa, PMII juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan publik, sehingga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial dan partisipasi masyarakat (Kasira & Effendi, 2023).

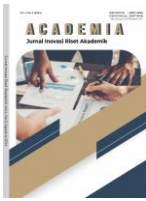


Dalam perkembangannya, PMII terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi kebijakan publik, pendidikan masyarakat, pemberdayaan pemuda, penguatan demokrasi lokal, hingga pengembangan komunitas berbasis masyarakat.

Peran PMII menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan daerah karena organisasi ini memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara kelompok intelektual muda dan masyarakat. Melalui kegiatan kaderisasi, diskusi publik, advokasi kebijakan, pengabdian masyarakat, serta berbagai program pemberdayaan, PMII berupaya membangun kesadaran kritis masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan (Florin & Wandersman, 1990). Dalam perspektif pembangunan partisipatif, aktivitas semacam ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses perubahan sosial dan pembangunan masyarakat melalui penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat lokal (Adamson, 2010).

Kota Lubuklinggau sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan partisipasi masyarakat, serta tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih responsif menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi tersebut, organisasi mahasiswa memiliki peluang untuk berkontribusi melalui berbagai program yang mendukung pembangunan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat. Kehadiran PMII Kota Lubuklinggau menunjukkan adanya upaya mahasiswa untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan melalui berbagai aktivitas sosial, pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai gerakan mahasiswa dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Studi yang dilakukan oleh Hidayah et al. (2022) menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa berperan penting dalam membentuk keterampilan partisipatif, kepemimpinan, dan keterlibatan sosial mahasiswa melalui berbagai program organisasi yang mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat (Hidayah et al., 2022). Selain itu, Yusuf dan Wibowo (2021) menemukan bahwa aktivisme digital mahasiswa melalui media sosial telah memperluas ruang partisipasi publik generasi muda dalam menyuarakan isu-isu sosial dan kebijakan publik, sehingga memperkuat keterlibatan sipil (*civic engagement*) di era digital (Yusuf & Wibowo, 2021). Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Hidayah & Sujastika (2024) yang menunjukkan bahwa penguatan civic disposition berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas sosial, politik, dan kemasyarakatan (Hidayah & Sujastika, 2024). Penelitian tersebut menegaskan bahwa organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Di Indonesia, kajian Ramadlan dan Aminuddin (2025) mengenai aktivisme mahasiswa pascaotoritarianisme menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa masih memiliki relevansi sebagai kekuatan sosial yang mampu memengaruhi ruang publik, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan mendorong perubahan sosial melalui berbagai bentuk aksi kolektif (Ramadlan & Aminuddin, 2025). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa organisasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai wadah kaderisasi dan pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang memiliki kapasitas untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan sosial di tingkat lokal maupun nasional.



Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek gerakan sosial, kaderisasi organisasi, pendidikan politik, dan fungsi kontrol sosial mahasiswa. Kajian yang secara khusus menempatkan organisasi mahasiswa sebagai katalisator pembangunan daerah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian tentang PMII umumnya lebih banyak mengkaji aspek ideologi organisasi, kaderisasi, dan dinamika gerakan mahasiswa, sementara studi yang menelaah kontribusi PMII terhadap pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan partisipatif dan modal sosial masih jarang dilakukan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai peran PMII dalam pembangunan daerah.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa PMII tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kaderisasi mahasiswa, tetapi juga merupakan bagian dari aktor masyarakat sipil yang memiliki kemampuan untuk mempercepat proses pembangunan melalui advokasi kebijakan, penguatan partisipasi masyarakat, pembangunan jejaring sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, konsep katalisator pembangunan digunakan untuk menjelaskan bagaimana PMII berperan dalam mempercepat lahirnya perubahan sosial yang mendukung pembangunan daerah. Perspektif ini menjadi penting karena memberikan pemahaman baru mengenai kontribusi organisasi mahasiswa dalam pembangunan daerah yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai kelompok penekan (*pressure group*) atau kelompok kontrol sosial semata.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan peran PMII sebagai katalisator pembangunan daerah melalui perspektif modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam konteks Kota Lubuklinggau. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek gerakan mahasiswa dan kaderisasi organisasi, penelitian ini berfokus pada bagaimana PMII membangun jejaring sosial, mendorong partisipasi publik, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta berperan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian masyarakat sipil, modal sosial, dan pembangunan daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kolaborasi antara organisasi mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Lubuklinggau sebagai katalisator pembangunan daerah melalui perspektif modal sosial dan pembangunan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai katalisator pembangunan daerah di Kota Lubuklinggau. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, serta interpretasi para aktor yang terlibat dalam aktivitas organisasi dan pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi PMII dalam mendorong partisipasi masyarakat, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan sosial di tingkat lokal.

Penelitian dilaksanakan di Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi dipilih secara purposif karena PMII aktif dalam kegiatan sosial, kepemudaan, pendidikan, dan advokasi pembangunan



daerah. Pengumpulan data dilakukan di sekretariat PMII serta lokasi kegiatan organisasi yang relevan. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas organisasi maupun pembangunan daerah. Informan penelitian terdiri atas Ketua PC PMII Kota Lubuklinggau, Sekretaris PC PMII Kota Lubuklinggau, Ketua Bidang Eksternal dan Gerakan, Ketua KOPRI PMII Kota Lubuklinggau, kader aktif PMII, akademisi atau pengamat sosial, serta perwakilan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pemilihan informan dari berbagai latar belakang dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam dan mendalam mengenai peran PMII dalam pembangunan daerah.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah, seperti kegiatan advokasi, diskusi publik, pengabdian masyarakat, dan program pemberdayaan sosial. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan mengenai bentuk kontribusi PMII, strategi organisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perannya sebagai katalisator pembangunan daerah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa program kerja organisasi, laporan kegiatan, arsip kelembagaan, publikasi media, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari temuan lapangan. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang selama proses penelitian guna memastikan konsistensi dan akurasi interpretasi data. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* kepada beberapa informan utama untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dan pengalaman yang disampaikan oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII Kota Lubuklinggau mengalami perkembangan peran dari organisasi yang berorientasi pada kaderisasi mahasiswa menjadi organisasi yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan wawancara dengan pengurus organisasi, kader aktif, dan perwakilan pemerintah daerah, ditemukan enam tema utama, yaitu transformasi organisasi, penguatan modal sosial, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan pemerintah daerah, dampak sosial, dan tantangan organisasi.

Transformasi Organisasi PMII

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan orientasi PMII Kota Lubuklinggau dari penguatan kaderisasi internal menuju keterlibatan yang lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada awal keberadaannya sejak 2009, aktivitas organisasi lebih banyak diarahkan



pada kaderisasi dan pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa. Perkembangan kebutuhan masyarakat kemudian mendorong PMII memperluas aktivitasnya ke bidang sosial, pendidikan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan. Ketua Cabang PMII Kota Lubuklinggau menjelaskan:

“Pada awalnya gerakan PMII lebih banyak berfokus pada kaderisasi internal dan penguatan kapasitas mahasiswa. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, PMII Lubuklinggau mulai memperluas perannya ke ranah sosial, pendidikan, lingkungan, hingga advokasi kebijakan publik. Saat ini PMII tidak hanya dikenal sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam pembangunan daerah.” (Muhammad Arkha, wawancara, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perluasan aktivitas PMII berlangsung melalui perubahan orientasi gerakan dari kepentingan internal organisasi menuju keterlibatan dalam persoalan masyarakat dan pembangunan daerah. Pandangan yang sama disampaikan oleh Sekretaris Cabang PMII yang menyatakan bahwa orientasi gerakan PMII diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Orientasi gerakan PMII tidak hanya berfokus pada pengembangan organisasi, tetapi juga pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.” (Rio Apandi, wawancara, 2026).

Kesamaan keterangan kedua informan menunjukkan bahwa perluasan peran tersebut telah menjadi bagian dari orientasi organisasi, bukan sekadar aktivitas individual kader. Orientasi tersebut tercermin dalam upaya PMII mengarahkan berbagai kegiatan organisasi untuk merespons kebutuhan masyarakat dan persoalan pembangunan daerah. Dengan demikian, keterlibatan PMII dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan bagian dari arah gerakan organisasi yang dikembangkan secara kolektif.

Penguatan Modal Sosial

Penguatan modal sosial terlihat dari terbentuknya hubungan antara organisasi, kader, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. PMII memosisikan diri sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat, gagasan akademik, dan kebijakan pemerintah. Posisi tersebut diwujudkan melalui komunikasi, jejaring, dan keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan organisasi. Ketua Cabang PMII menjelaskan:

“PMII tidak berada pada posisi sebagai pelaksana pembangunan secara langsung seperti pemerintah, tetapi menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat, gagasan akademik, dan kebijakan publik.” (Muhammad Arkha, wawancara, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peran penghubung menjadi salah satu bentuk kontribusi PMII dalam mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya. Jejaring tersebut juga terlihat dari keterlibatan pengurus, kader, masyarakat, dan pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan, serta forum dialog.



Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendidikan masyarakat, pelatihan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, kegiatan sosial, dan advokasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam beberapa tahapan program. Kader aktif PMII menjelaskan:

“Program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.” (Khusnul Khoiri, wawancara, 2026).

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kegiatan, tetapi juga turut terlibat dalam proses pelaksanaan program. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya perubahan dalam keterlibatan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan.

“Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial dan lebih terbuka terhadap berbagai program pemberdayaan.” (Khusnul Khoiri, wawancara, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat, penguatan kapasitas, dan pengembangan kemandirian dalam kegiatan sosial. Arah pemberdayaan tersebut terlihat dari upaya PMII melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. Keterlibatan tersebut tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima kegiatan, tetapi juga sebagai pihak yang berpartisipasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sosial.

Kemitraan dengan Pemerintah Daerah

Hubungan PMII dengan pemerintah daerah menunjukkan pola kemitraan yang tidak hanya bersifat dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga mencakup penyampaian kritik, aspirasi, dan rekomendasi kebijakan. Bentuk interaksi tersebut dilakukan melalui audiensi, forum dialog, seminar, FGD, dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Sekretaris Cabang PMII menjelaskan:

“Hubungan yang dibangun bukan hanya sebagai pendukung pemerintah, tetapi juga sebagai mitra kritis yang memberikan masukan demi perbaikan kebijakan pembangunan.” (Rio Apandi, wawancara, 2026).

Pandangan tersebut juga muncul dari pihak pemerintah daerah. Staf Ahli Pemerintah Kota Lubuklinggau menyatakan:

“PMII berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kepemudaan, serta menjadi wadah dialog bagi mahasiswa Islam dalam membahas berbagai isu daerah dan memberikan solusi yang konstruktif.” (Achmad Hasian Ritonga, wawancara, 2026).

Kedua sumber menunjukkan bahwa hubungan PMII dan pemerintah daerah berlangsung melalui komunikasi dua arah. PMII menyampaikan aspirasi, masukan, dan rekomendasi terkait isu yang berkembang di masyarakat, sedangkan pemerintah daerah



memberikan ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan pembangunan dan kepemudaan. Pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya interaksi timbal balik yang memungkinkan PMII menyampaikan kepentingan masyarakat sekaligus memperoleh ruang untuk terlibat dalam pembahasan isu pembangunan daerah.

Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, keterlibatan sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ketua Cabang PMII menjelaskan bahwa kontribusi organisasi tidak selalu diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui kegiatan yang mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pengalaman kader yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan memperlihatkan adanya perubahan dalam keterlibatan masyarakat:

“Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial dan lebih terbuka terhadap berbagai program pemberdayaan.” (Khusnul Khoiri, wawancara, 2026).

Selain peningkatan partisipasi, kegiatan PMII juga diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan solidaritas sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sosial PMII berlangsung melalui kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, berpartisipasi dalam kegiatan, dan membangun hubungan sosial.

Tantangan Organisasi

Meskipun memiliki berbagai bentuk kontribusi, PMII Kota Lubuklinggau masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan perannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya organisasi menjadi tantangan yang paling banyak disebutkan oleh informan. Keterbatasan tersebut meliputi pendanaan kegiatan, jumlah kader yang aktif, dan sarana pendukung organisasi. Ketua Cabang PMII mengungkapkan:

“Tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya organisasi, baik dari segi pendanaan maupun jumlah kader yang dapat terlibat secara maksimal.” (Muhammad Arkha, wawancara, 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Cabang dan Ketua KOPRI yang menyebutkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Selain keterbatasan internal, proses advokasi kebijakan yang membutuhkan waktu panjang dan variasi tingkat partisipasi kader juga menjadi tantangan.

Dari perspektif pemerintah daerah, tantangan lainnya berkaitan dengan intensitas komunikasi dan kolaborasi. Pemerintah daerah menilai bahwa frekuensi dialog dan kerja sama dengan PMII masih perlu diperkuat agar keterlibatan organisasi dalam pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih optimal.

Ringkasan Temuan

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan adanya beberapa pola peran PMII Kota Lubuklinggau dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Temuan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam enam tema utama yang mencerminkan bentuk

keterlibatan organisasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta hubungan PMII dengan berbagai pihak. Keenam tema tersebut beserta temuan utama dan implikasinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian tentang Peran PMII sebagai Katalisator Pembangunan Daerah

No.	Aspek Temuan	Bentuk Peran PMII	Informan Pendukung	Implikasi
1	Transformasi organisasi	Berkembang dari organisasi kaderisasi menjadi aktor masyarakat sipil	Ketua Cabang PMII	Memperluas kontribusi terhadap pembangunan daerah
2	Penguatan modal sosial	Membangun kepercayaan, jejaring sosial, dan partisipasi masyarakat	Ketua Cabang, Sekretaris, Kader Aktif	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
3	Pemberdayaan masyarakat	Pendidikan masyarakat, pelatihan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, dan advokasi kebijakan	Kader Aktif, Ketua KOPRI	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
4	Kemitraan dengan pemerintah	Audiensi, forum dialog, FGD, dan rekomendasi kebijakan	Pemerintah Kota, Sekretaris PMII	Memperkuat komunikasi masyarakat dan pemerintah
5	Dampak sosial	Meningkatkan kesadaran sosial, solidaritas, kepedulian, dan partisipasi publik	Ketua Cabang, Kader Aktif	Mendukung pembangunan daerah yang partisipatif
6	Tantangan organisasi	Keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor	Seluruh informan	Membatasi optimalisasi peran PMII

Tabel 1 menunjukkan bahwa peran PMII dalam pembangunan daerah terbentuk melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan. Transformasi organisasi menjadi dasar perluasan aktivitas, sedangkan jejaring sosial dan kegiatan pemberdayaan menjadi sarana bagi organisasi untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, kemitraan dengan pemerintah membuka ruang bagi PMII untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi, sementara keterbatasan sumber daya dan kolaborasi menjadi kendala yang masih dihadapi organisasi.

Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa peran PMII tidak hanya ditunjukkan melalui banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama melalui perubahan orientasi organisasi dan pola keterlibatannya dalam pembangunan daerah. PMII berkembang dari fokus kaderisasi internal menuju kegiatan yang mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan jejaring, dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Namun, perluasan peran tersebut masih berhadapan dengan keterbatasan pendanaan, sumber daya kader, dan intensitas kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, keenam tema tersebut menunjukkan bahwa peran PMII sebagai katalisator pembangunan daerah berlangsung melalui keterkaitan antara kapasitas organisasi, keterlibatan masyarakat, dan hubungan dengan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosial dan pemberdayaan menjadi ruang utama bagi organisasi untuk membangun keterlibatan masyarakat, sedangkan forum dialog dan advokasi menjadi ruang interaksi dengan pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan pola peran PMII yang berkembang dari kaderisasi internal menuju keterlibatan yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

Dari perspektif pemerintah daerah, tantangan lain yang masih perlu diperbaiki adalah intensitas komunikasi dan kolaborasi antara PMII dan pemerintah daerah. Menurut informan pemerintah, PMII perlu meningkatkan frekuensi dialog dan kerja sama agar kontribusi organisasi dalam pembangunan daerah dapat lebih optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi organisasi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Lubuklinggau memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas kaderisasi organisasi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PMII berfungsi sebagai aktor penghubung yang menjembatani kebutuhan masyarakat, gagasan akademik, dan kebijakan pemerintah daerah. Hubungan antarperan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam model temuan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1



Gambar 1. Evolusi dan Peran PMII di Kota Lubuklinggau

Gambar 1 menunjukkan evolusi peran PMII Kota Lubuklinggau dari organisasi yang pada awalnya berfokus pada kaderisasi mahasiswa menjadi aktor masyarakat sipil yang



berkontribusi dalam pembangunan daerah. Transformasi tersebut diawali dari penguatan kapasitas internal organisasi, kemudian berkembang melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Seiring perkembangan tersebut, PMII membangun kemitraan dengan pemerintah daerah sebagai mitra kritis dalam proses pembangunan, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan sumber daya organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa peran PMII sebagai katalisator pembangunan daerah merupakan hasil dari proses transformasi organisasi yang ditandai oleh penguatan jejaring kolaboratif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan partisipatif.

Model temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran PMII sebagai katalisator pembangunan daerah dibangun melalui keterkaitan antara penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, serta pembangunan jejaring kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Keseluruhan proses tersebut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan pembangunan daerah yang lebih inklusif. Dengan demikian, PMII tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kaderisasi mahasiswa, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang mampu mendorong perubahan sosial dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kota Lubuklinggau.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII Kota Lubuklinggau telah menjalankan peran yang cukup penting dalam pembangunan daerah melalui aktivitas kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, pendidikan sosial, dan penguatan partisipasi publik. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan mahasiswa, tetapi juga berkembang menjadi salah satu aktor masyarakat sipil yang berupaya mendorong perubahan sosial dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, PMII menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus memperluas kontribusinya melalui penguatan kualitas kader, perluasan kemitraan, dan pengembangan program-program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

Pembahasan

PMII sebagai Katalisator Pembangunan Daerah melalui Penguatan Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PMII Kota Lubuklinggau tidak hanya menjalankan fungsi tradisional sebagai organisasi kaderisasi mahasiswa, tetapi telah berkembang menjadi salah satu aktor masyarakat sipil yang berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial (*social capital*) dan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan kesadaran sosial, penguatan partisipasi publik, serta penciptaan jejaring kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai organisasi sosial lainnya (Ali, 2025). Temuan tersebut sejalan dengan Hidayah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat menjadi ruang untuk mengembangkan keterampilan partisipatif, kepemimpinan, dan keterlibatan sosial mahasiswa melalui aktivitas organisasi. Temuan penelitian ini memperluas hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa kapasitas partisipatif yang dibangun melalui organisasi mahasiswa tidak hanya berimplikasi pada pengembangan anggota organisasi, tetapi juga dapat diarahkan pada



keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Dalam konteks PMII Kota Lubuklinggau, proses tersebut terlihat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan sosial, serta interaksi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa organisasi mahasiswa dapat menjalankan fungsi yang lebih luas sebagai aktor masyarakat sipil dalam pembangunan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi PMII terhadap pembangunan daerah tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan advokasi dan kritik sosial, melainkan juga melalui pembangunan fondasi sosial yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan (Arista et al., 2025).

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas negara dalam menyediakan sumber daya dan pelayanan publik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun hubungan sosial yang produktif dan partisipatif (Mansuri & Rao, 2013). Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan aktor-aktor sosial yang mampu menghubungkan kepentingan masyarakat dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII Kota Lubuklinggau memainkan fungsi tersebut melalui berbagai kegiatan pendidikan masyarakat, pelatihan kepemudaan, pengabdian masyarakat, advokasi sosial, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan sosial yang bersifat jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu menjadi pelaku pembangunan yang mandiri (Suyono et al., 2026).

Peran tersebut terlihat dari cara PMII memaknai keberadaannya di tengah masyarakat. Ketua Cabang PMII Kota Lubuklinggau menjelaskan bahwa orientasi gerakan organisasi saat ini tidak lagi terbatas pada penguatan kaderisasi internal, tetapi diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Menurutnya, PMII berupaya menjadi organisasi yang mampu menjawab berbagai kebutuhan sosial masyarakat melalui kegiatan yang relevan dengan kondisi daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PMII memandang pembangunan sebagai proses transformasi sosial yang membutuhkan keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dan kelompok pemuda dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran peran organisasi mahasiswa dari sekadar wadah pengembangan intelektual menjadi agen pembangunan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif teori modal sosial, temuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan pemikiran Bourdieu (1989) yang menjelaskan bahwa modal sosial merupakan sumber daya aktual maupun potensial yang diperoleh melalui kepemilikan jaringan hubungan sosial yang relatif permanen. Keberadaan jaringan sosial memungkinkan individu maupun kelompok memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks penelitian ini, PMII berfungsi sebagai ruang yang mempertemukan berbagai aktor sosial melalui aktivitas organisasi, sehingga terbentuk jaringan sosial yang mampu memperkuat hubungan antara mahasiswa, masyarakat, tokoh lokal, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah (Fakih, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program yang dilaksanakan PMII tidak hanya menghasilkan kegiatan seremonial, tetapi juga membangun hubungan sosial yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan kepemudaan, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan telah menciptakan interaksi yang intensif antara kader PMII dan masyarakat. Interaksi tersebut memungkinkan terbentuknya hubungan saling percaya yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan sosial. Menurut Putnam (1993), kepercayaan sosial (*social trust*) merupakan salah satu elemen utama modal sosial yang



menentukan keberhasilan tindakan kolektif dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki suatu komunitas, semakin besar peluang terciptanya kerja sama yang produktif untuk mencapai tujuan bersama (Fukuyama, 1996).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PMII terbentuk melalui keterlibatan langsung kader dalam berbagai kegiatan sosial. Masyarakat menerima kehadiran PMII bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa, tetapi sebagai kelompok yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi. Kepercayaan tersebut terlihat dari tingginya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan PMII serta dukungan yang diberikan terhadap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan organisasi. Dalam konteks ini, PMII berhasil membangun apa yang oleh Putnam (2000) disebut sebagai *bridging social capital*, yaitu modal sosial yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat melalui hubungan yang bersifat inklusif dan kolaboratif (Putnam, 2000). Temuan mengenai keterlibatan sosial dan kepercayaan masyarakat juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Kasira dan Effendi (2023) yang menunjukkan adanya internalisasi nilai religiusitas dan kepedulian sosial dalam aktivitas mahasiswa PMII. Jika penelitian tersebut menekankan pembentukan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa, penelitian ini menunjukkan perkembangan lebih lanjut berupa pemanfaatan kepedulian tersebut dalam hubungan organisasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kepedulian sosial yang dibangun melalui aktivitas organisasi dapat menjadi dasar terbentuknya interaksi yang lebih intensif antara kader dan masyarakat serta mendukung penguatan kepercayaan sosial.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan pembangunan. Kader PMII menjelaskan bahwa sebagian besar program organisasi dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program yang dilaksanakan sehingga tingkat partisipasi mereka menjadi lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa PMII tidak menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah perubahan sosial (Fais et al., 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan pemikiran Coleman (1988) yang menjelaskan bahwa modal sosial berfungsi sebagai sumber daya yang memfasilitasi tindakan kolektif dalam masyarakat. Coleman menegaskan bahwa hubungan sosial yang dibangun melalui norma, kewajiban, dan kepercayaan akan mendorong individu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama (Coleman, 1988). Dalam penelitian ini, berbagai aktivitas PMII menunjukkan adanya upaya membangun ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam proses pembangunan. Melalui forum diskusi, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta terlibat dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

Selain memperkuat partisipasi masyarakat, PMII juga berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu elemen penting pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program organisasi berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat. Program pendidikan masyarakat, literasi sosial, pelatihan kepemimpinan pemuda, dan pemberdayaan perempuan merupakan bentuk nyata upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam



perspektif pembangunan manusia, peningkatan kapasitas individu merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan karena masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai akan lebih mampu berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Ariyanti et al., 2020).

Dampak dari berbagai program tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, partisipasi sosial, dan pengembangan kapasitas diri. Informan penelitian menjelaskan bahwa masyarakat menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta lebih terbuka terhadap program-program pemberdayaan yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa PMII tidak hanya menghasilkan output berupa kegiatan organisasi, tetapi juga menghasilkan perubahan sosial yang berkontribusi terhadap penguatan kapasitas masyarakat. Perubahan tersebut menjadi indikator penting bahwa pembangunan sosial yang dilakukan PMII memiliki dampak yang melampaui kepentingan internal organisasi (Damanik et al., 2026).

Secara konseptual, temuan penelitian ini juga memperluas kajian mengenai peran organisasi mahasiswa dalam pembangunan daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan organisasi mahasiswa sebagai agen kontrol sosial, kelompok penekan (pressure group), atau aktor gerakan sosial yang berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa PMII memiliki peran yang lebih kompleks dan strategis. Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai kelompok advokasi, tetapi juga sebagai institusi yang membangun modal sosial melalui penciptaan jaringan sosial, peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan partisipasi publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, PMII tidak hanya mendorong perubahan melalui kritik dan advokasi, tetapi juga melalui pembangunan kapasitas sosial yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan partisipatif.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Putnam, pembangunan yang berhasil tidak hanya membutuhkan institusi formal yang kuat, tetapi juga institusi sosial yang mampu membangun kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat (Putnam, 2000). Dalam konteks Kota Lubuklinggau, PMII telah menunjukkan peran tersebut melalui berbagai aktivitas yang memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PMII dapat dipahami sebagai bagian dari infrastruktur sosial pembangunan yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif, inklusif, dan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMII Kota Lubuklinggau berperan sebagai katalisator pembangunan daerah melalui mekanisme penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui pembangunan jaringan sosial, peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan partisipasi publik, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Melalui berbagai aktivitas tersebut, PMII berhasil menciptakan kondisi sosial yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat fondasi sosial yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran PMII dalam Pembangunan Daerah: Analisis Perspektif Modal Sosial

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa PMII Kota Lubuklinggau tidak hanya menjalankan fungsi sebagai organisasi kaderisasi mahasiswa, tetapi juga berperan sebagai aktor masyarakat sipil yang berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial (*social capital*) dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini



menunjukkan bahwa peran organisasi mahasiswa dalam pembangunan daerah tidak dapat dipahami hanya melalui aktivitas advokasi dan kontrol sosial, melainkan juga melalui kemampuannya membangun relasi sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, fungsi tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan (Damanik et al., 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII secara aktif mengembangkan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pendidikan masyarakat, pelatihan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pengabdian masyarakat, advokasi sosial, dan penguatan literasi publik. Berbagai program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengabdian organisasi, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun hubungan sosial yang lebih luas antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai kelompok sosial lainnya. Melalui aktivitas tersebut, PMII berupaya menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan terbentuknya kepercayaan sosial, partisipasi kolektif, dan solidaritas masyarakat. Temuan mengenai pemberdayaan masyarakat tersebut sejalan dengan Suyono et al. (2026) yang menempatkan edukasi partisipatif sebagai pendekatan untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Kesamaan tersebut terlihat pada penggunaan kegiatan edukasi dan pelibatan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi. Namun, penelitian ini menunjukkan konteks yang berbeda karena pemberdayaan dilakukan oleh organisasi mahasiswa sebagai aktor masyarakat sipil yang sekaligus membangun hubungan antara masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kontribusi PMII tidak hanya terletak pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, tetapi juga pada kemampuannya membangun jejaring sosial yang mendukung keberlanjutan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas organisasi telah bergerak melampaui fungsi kaderisasi internal menuju peran yang lebih strategis dalam pembangunan sosial masyarakat (Hasan et al., 2025).

Ketua Cabang PMII Kota Lubuklinggau menjelaskan bahwa organisasi memandang dirinya sebagai penggerak yang mampu mempercepat lahirnya perubahan sosial melalui penguatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Posisi PMII sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah juga sejalan dengan penelitian Arista et al. (2025) mengenai PMII Ogan Komering Ulu yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi penghubung merupakan salah satu bentuk keterlibatan PMII dalam ruang publik di tingkat lokal. Penelitian ini memperluas temuan Arista et al. (2025) dengan menunjukkan bahwa fungsi penghubung PMII Kota Lubuklinggau tidak hanya berlangsung melalui komunikasi dan penyampaian aspirasi, tetapi juga terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan jejaring sosial, dan peningkatan partisipasi publik. Perluasan tersebut memberikan gambaran bahwa peran PMII sebagai aktor masyarakat sipil dapat berlangsung melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam pandangannya, PMII tidak bertindak sebagai pelaksana pembangunan sebagaimana pemerintah daerah, tetapi berupaya menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat, gagasan akademik, dan berbagai program pembangunan yang berkembang di daerah. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa organisasi menempatkan dirinya sebagai aktor yang berupaya menciptakan kondisi sosial yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah (Gao et al., 2025). Untuk memahami bentuk kontribusi tersebut secara

lebih sistematis, hasil penelitian dapat dianalisis menggunakan perspektif modal sosial sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Peran PMII dalam Penguatan Modal Sosial dan Pembangunan Daerah

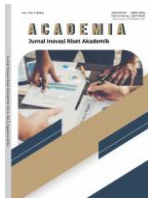
Dimensi Modal Sosial	Temuan Empiris	Bentuk PMII	Aktivitas	Implikasi terhadap Pembangunan Daerah
Trust (Kepercayaan)	Masyarakat memberikan respons positif terhadap program PMII dan terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi	Pengabdian masyarakat, sosial, kemanusiaan, pendidikan masyarakat	bakti kegiatan masyarakat	Meningkatkan legitimasi organisasi dan memperkuat partisipasi masyarakat
Social Network (Jaringan Sosial)	Terbangunnya kerja sama antara PMII, pemerintah, kampus, organisasi kepemudaan, dan masyarakat	Audiensi, seminar, FGD, kolaborasi lintas sektor		Memperluas akses sumber daya dan dukungan pembangunan
Participation (Partisipasi)	Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program	Pelatihan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
Human Capacity Development	Terjadi peningkatan kesadaran sosial dan kapasitas masyarakat	Literasi publik, pendidikan masyarakat, pelatihan kepemimpinan		Mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah
Collective Action	Muncul kerja sama antara kader, masyarakat, dan pemangku kepentingan	Advokasi sosial, kegiatan lingkungan, pemberdayaan komunitas		Memperkuat keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat

Sumber: *Analisis Peneliti Berdasarkan Data Lapangan (2026).*

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PMII terhadap pembangunan daerah berlangsung melalui mekanisme penguatan modal sosial yang mencakup pembangunan kepercayaan, perluasan jaringan sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas manusia, dan pembentukan tindakan kolektif. Kelima aspek tersebut merupakan elemen utama modal sosial yang menurut Putnam memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat (Putnam, 2000).

Dimensi pertama yang paling menonjol adalah kepercayaan sosial (social trust). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap berbagai program yang dijalankan PMII. Kepercayaan tersebut muncul karena masyarakat melihat secara langsung keterlibatan kader PMII dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dalam teori Putnam, kepercayaan sosial merupakan fondasi utama yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap suatu institusi, semakin besar peluang terciptanya kerja sama yang produktif dalam mencapai tujuan bersama (Putnam, 2000). Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan masyarakat terhadap PMII menjadi modal penting yang memungkinkan organisasi menjalankan berbagai program pembangunan secara lebih efektif.

Selain membangun kepercayaan, PMII juga berhasil membangun jaringan sosial yang luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi menjalin kerja sama dengan pemerintah



daerah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, media massa, komunitas lokal, dan berbagai kelompok masyarakat. Jaringan tersebut tidak hanya memperluas jangkauan program organisasi, tetapi juga meningkatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan (Portes, 2009). Temuan ini sejalan dengan pandangan Bourdieu (1989) yang menjelaskan bahwa jaringan sosial merupakan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan sosial, ekonomi, maupun politik.

Aspek lain yang juga menonjol adalah kemampuan PMII dalam mendorong partisipasi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan organisasi disusun melalui proses identifikasi kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa PMII telah menerapkan prinsip pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan argumentasi Mansuri dan Rao (2013) bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan.

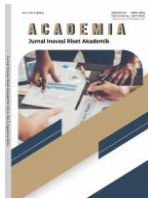
Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Berbagai kegiatan pendidikan masyarakat, pelatihan kepemudaan, literasi sosial, dan pemberdayaan perempuan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Senge (2006) yang menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kemampuan manusia untuk menentukan pilihan hidup yang lebih baik. Dengan demikian, kontribusi PMII tidak hanya terlihat pada peningkatan partisipasi sosial, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian organisasi mahasiswa dan pembangunan daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memandang organisasi mahasiswa sebagai aktor gerakan sosial atau kelompok kontrol sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa PMII berperan sebagai institusi penghasil modal sosial yang mendukung pembangunan daerah (Carmen et al., 2022). Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat jaringan sosial, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

Dengan demikian, PMII Kota Lubuklinggau dapat dipahami sebagai katalisator pembangunan daerah yang bekerja melalui mekanisme penguatan modal sosial. Organisasi ini menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pembangunan kepercayaan, jaringan sosial, partisipasi, dan kapasitas manusia. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan institusi formal yang kuat, tetapi juga membutuhkan organisasi masyarakat sipil yang mampu membangun modal sosial sebagai fondasi utama perubahan sosial dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PMII Kota Lubuklinggau berperan sebagai katalisator pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial dan pembangunan partisipatif. Peran tersebut diwujudkan melalui pembangunan kepercayaan sosial, perluasan jejaring

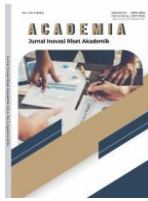


kolaboratif, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa PMII tidak hanya menjalankan fungsi kaderisasi mahasiswa, tetapi juga berperan sebagai aktor masyarakat sipil yang mendukung pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa modal sosial merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang partisipatif. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas organisasi, perluasan kemitraan strategis, dan peningkatan kolaborasi antara organisasi mahasiswa, pemerintah daerah, serta masyarakat agar peran PMII sebagai katalisator pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji kontribusi organisasi mahasiswa pada konteks daerah yang berbeda atau menggunakan pendekatan komparatif untuk memperluas pemahaman mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, D. (2010). Community empowerment: Identifying the barriers to “purposeful” citizen participation. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 30(3–4), 114–126. <https://doi.org/10.1108/01443331011033319>
- Ali, H. (2025). Digitalisasi dan Transformasi Organisasi Nahdlatul Ulama: Menjaga Tradisi, Memperkuat Tata Kelola, dan Merespon Perubahan Sosial di Era Digital. *Tashwirul Afkar*, 44(2), 264–272. <https://doi.org/10.51716/ta.v44i2.686>
- Arista, R., Anita, R., Maudi, A., Pratiwi, W., Roni, A., & Susanti, E. (2025). Peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ogan Komering Ulu sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 2171–2180. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/4385>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariyanti, K. S., Prasetyo, B., Helminasari, S., & Abigayl, I. (2020). *Teori Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat*. Pradina Pustaka.
- Atmojo, D. (2025). Political Linkages of the Indonesian Islamic Student Movement. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 17(2), 86–93. <https://doi.org/10.32734/politeia.v17i2.17165>
- Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. *Sociological Theory*, 7(1), 14–25. <https://doi.org/10.2307/202060>
- Carmen, E., Fazey, I., Ross, H., Bedinger, M., Smith, F. M., Prager, K., McClymont, K., & Morrison, D. (2022). Building community resilience in a context of climate change: The role of *social capital*. *Ambio*, 51(6), 1371–1387. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01678-9>
- Coleman, S. (1988). *Aspects of Symmetry: Selected Erice Lectures*. Cambridge University Press.



- Damanik, F. H. S., Hardiyanti, A., Sudarwati, L., Sudiar, S., Daulay, P., Dewi, O., & Halimah, L. R. (2026). *Sosiologi Pembangunan: Teori, Konsep, Transformasi dan Realitas Sosial Pembangunan Nasional*. Star Digital Publishing.
- Fais, A. D. M. Z., Zahra, F. A. A., Amanina, N. K., Ningtyas, M. A. F., & Chamami, M. R. (2026). Sejarah Pemikiran Gus Dur sebagai Sumber Perumusan Nilai Gerakan PMII Rayon Abdurrahman Wahid UIN Walisongo Semarang. *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, Dan Budaya*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.62238/nagripustaka.v4i1.341>
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Insist Press (InsistPress). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484850657409>
- Florin, P., & Wandersman, A. (1990). An introduction to citizen participation, voluntary organizations, and community development: Insights for empowerment through research. *American Journal of Community Psychology*, 18(1), 41–54. <https://doi.org/10.1007/BF00922688>
- Fukuyama, F. (1996). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Simon and Schuster.
- Gao, Z., Chee, C. S., Omar Dev, R. D., Liu, Y., Gao, J., Li, R., Li, F., Liu, X., & Wang, T. (2025). Social capital and physical activity: A literature review up to March 2024. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1467571>
- Hasan, L. D., Pattiasina, R. Y., Lisbet, Z. T., & Astaginy, N. (2025). *Kepemimpinan: Mewujudkan Hal-Hal Luar Biasa dalam Organisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayah, Y., Fen, C., Suryaningsih, A., & Mazid, S. (2022). Promoting student participation skills through student organizations. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 213–223. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53422>
- Hidayah, Y., & Sujastika, I. (2024). Strengthening Civic Disposition to Build Civic Engagement and Political Participation in Civic Education in Indonesia. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 5(2), 233–240. <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i2.9867>
- Kasira, B., & Effendi, M. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Religiusitas Dan Kepedulian Sosial Di Kalangan Mahasiswa Komisariat PMII IAIN Ponorogo. *Arsyadana: Journal of Education and Socio Cultural Issues*, 2(1), 31–40. <https://ejournal.uinponorogo.ac.id/index.php/arsyadana/article/view/2986>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Publications.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *An analytic approach for discovery*.
- Muna, C. (2022). Eksistensi Peran Mahasiswa Dalam Pengabdian Masyarakat. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(01), 32–50. <https://doi.org/10.58812/ejimes.v1i01.24>



- Portes, A. (2009). *SOCIAL CAPITAL: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. In *New Critical Writings in Political Sociology*. Routledge.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Ramadlan, M., & Aminuddin, M. F. (2025). Student Activism In Post-Authoritarian Indonesia: Higher Education Reform, Movement Dynamics, And Shifting Political Narratives. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10, 313–327. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.51485>
- Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Broadway Business.
- Suyono, S., Aunullah, I., & Sa'diyah, H. (2026). Implementasi model pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi partisipatif dalam penguatan kapasitas sosial dan ekonomi lokal. *Penamas: Journal of Community Service*, 6(1), 121-130. <https://doi.org/10.53088/penamas.v6i1.2827>
- Yusuf, N., & Wibowo, A. (2021). Civic engagement: Digital activism of university students in Malang amidst covid-19 pandemic. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41499>
- Zuliyah, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/jr&d.v1i2.23804>